



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Kompleks Perkantoran Pemkab. Banyuasin Jalan Badrun Mamak No. 5 Pangkalan Balai  
Telp. (0711) 7690120 Fax. (0711) 7690120 Kode Pos 30753  
Website : dlh.banyuasinkab.go.id, email : dlhbanyuasin@gmail.com

# **LAPORAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN (FS) TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST) SEMUNTUL KABUPATEN BANYUASIN**

# **2024**



**CV. TATA P'SETYA**  
DESIGN - ENGINEERING - CONSULTING

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan kasih sayangNya berupa nikmat jasmani dan rohani penulis dapat menyelesaikan **Laporan Pendahuluan Penyusunan Studi Kelayakan (FS) TPST Semuntul Kabupaten Banyuasin.**

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan pendahuluan ini. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan penulis demi perbaikan laporan di masa mendatang. Penulis berharap laporan ini dapat berguna bagi para pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Pangkalan Balai, November 2024

Tim Penyusun

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Ruang Lingkup .....	2
1.4. Landasan Hukum .....	3
1.5. Sistematika Penulisan .....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	5
2.1. Analisis Aspek Teknis .....	5
2.2. Analisis Aspek Keuangan .....	6
2.3. Analisis Aspek Kelembagaan .....	7
2.4. Analisis Aspek Lingkungan .....	10
2.5. Analisis Aspek Sosial .....	11
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN .....	13
3.1. Batas Administrasi .....	13
3.2. Demografi .....	14
3.2.1 Kependudukan .....	14
3.2.2 Kondisi Ekonomi .....	15
3.2.3 Kondisi Sosial dan Budaya .....	18
3.3. Kondisi Fisik .....	21
3.3.1 Letak Geografis .....	21
3.3.2 Hidrologi .....	22
3.3.3 Topografi .....	22
3.3.4 Klimatologi .....	23
3.3.5 Geologi .....	24
3.4. Tata Ruang .....	25
BAB IV METODOLOGI .....	37
4.1. Kerangka Pelaksanaan Pekerjaan .....	37
4.1.1 Pendekatan Penanganan Pekerjaan .....	37
4.2. Rencana Kerja .....	38
4.2.1 Tahap Persiapan .....	38

4.2.2 Pengumpulan Data .....	38
4.2.3 Analisis Kelayakan .....	39
BAB V ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN .....	41
5.1 Jadwal Penugasan Personil.....	41
5.2 Struktur Organisasi Personil .....	42

# DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Banyuasin.....	13
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuasin Per Kecamatan Tahun 2023 .....	14
Tabel 3.3 Perkembangan Pengeluaran Minimum per kapita perbulan di Kabupaten Banyuasin Tahun 2016-2023.....	15
Tabel 3.4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Banyuasin (miliar rupiah), 2019–2023 .....	16
Tabel 3.5 Laju Inflasi Kabupaten Banyuasin 2018-2022.....	17
Tabel 3.6 IPM Kabupaten Banyuasin yang dihitung dengan Metode Baru, 2019-2022 .....	18
Tabel 3.7 Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banyuasin Tahun 2022-2023.....	19
Tabel 3.8 Ketenagakerjaan Kabupaten Banyuasin,2023.....	19
Tabel 3.9 Indikator Bidang Kesehatan di Kabupaten Banyuasin Tahun 2019–2022.....	20
Tabel 3.10 Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Banyuasin, 2022 ....	20
Tabel 3.11 Rata-Rata Suhu, Kelembapan, dan Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Banyuasin 2023.....	23
Tabel 3.12 Klasifikasi Desa Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Banyuasin.....	30
Tabel 5.1 Penugasan Personil .....	41

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Hierarki Pengelolaan Sampah dan Hasil Tujuan yang akan Dicapai ....	8
Gambar 2.2 Skema Analisa Kelembagaan dan Peraturan .....	10
Gambar 2.3 Skema Analisa Lingkungan .....	11
Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Banyuasin .....	22
Gambar 3.2 Peta Topografi Kabupaten Banyuasin .....	23
Gambar 3.3 Peta Geologi Kabupaten Banyuasin .....	25
Gambar 3.4 Klasifikasi Wilayah Perkotaan dan Perdesaan.....	34
Gambar 5.1 Struktur Organisasi Pelaksanaan FS TPST Semuntul Kabuapten Banyuasin .	42



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah 11.832,99 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 21 kecamatan dan beribukota di Kota Pangkalan Balai. Adapun kepadatan penduduk di kabupaten tersebut adalah 67,72 jiwa km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebanyak 839.401 jiwa (BPS 2023). Kondisi pertumbuhan penduduk memberikan pengaruh terutama pada sektor yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, salah satunya yaitu penyediaan infrastruktur perkotaan, termasuk infrastruktur persampahan. Hal tersebut menjadi alasan sebuah wilayah membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang baik.

Sistem pengelolaan sampah merupakan sistem yang jika memiliki permasalahan akan memberikan dampak negatif jika tidak segera ditangani. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan dapat berdampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga perekonomian. Kondisi eksisting sistem pengelolaan sampah di Banyuasin mengalami beberapa permasalahan seperti masih terbatasnya kinerja pelayanan, karena keterbatasan sarana pengumpul dan pengangkut sampah yang berkinerja andal, lokasi TPA sampah eksisting yang masih dioperasikan dengan proses pembuangan terbuka (open dumping), serta manajemen persampahan yang belum memadai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah, bahwa penyelenggara TPA harus menerapkan sistem *sanitary landfill* atau *controlled landfill* dan tidak diperkenankan lagi paling lama setelah lima tahun sejak peraturan berlaku. Jakstrada Kabupaten Banyuasin juga menargetkan pada tahun 2025 pengurangan dan penanganan sampah mencapai 30% dan 70%. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi landasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin mengusulkan untuk membangun TPST baru yaitu TPST Semuntul.

Melalui *Feasibility Study* TPST Semuntul dapat menjadi bahan kajian untuk mengetahui kelayakan proyek secara teknis, ekonomi, lingkungan, sosial dan hukum pada pembangunan TPST Semuntul dan rencana penambahan lahan urug *landfill*. Proyek pembangunan TPST Semuntul diharapkan dapat mengatasi permasalahan sistem pengelolaan persampahan yang ada dan bermanfaat bagi masyarakat.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari pekerjaan ini adalah untuk mendapatkan hasil kajian yang meliputi penentuan potensi lokasi Pembangunan TPST berdasarkan kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan kajian lingkungan di Kabupaten Banyuasin.

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan dokumen studi kelayakan TPST sampah yang sesuai norma-standar-pedoman-kriteria, yang terjangkau dalam hal pembangunan-pengoperasian-pemeliharaan-perawatannya;
- b. Mendorong kinerja TPA/TPST sampah yang sesuai dengan norma-standar-pedoman-kriteria.

## **1.3. Ruang Lingkup**

Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan Konsultan dalam upaya untuk mencapai sasaran pekerjaan, yaitu :

- a. Tahapan Persiapan
  1. Menyusun rencana kerja
  2. Koordinasi dengan pemberi tugas/intansi terkait
  3. Studi literatur
  4. Menyusun jadwal survey
  5. Menyiapkan metode survey
  6. Mobilisasi peralatan dan tenaga yang diperlukan
  7. Menyusun Laporan Pendahuluan
- b. Tahapan Survey dan data sekunder yang meliputi :
  1. Survei rencana lokasi TPST
  2. Survei akses lokasi TPST
  3. Survei kondisi demografi dan sosial disekitar rencana TPST
- c. Melakukan input data berdasarkan hasil survey
- d. Analisa kelayakan, yang meliputi :
  1. Lokasi TPST
  2. Rencana Wilayah pelayanan
  3. Design teknologi dan kapasitas TPST
  4. Perkiraan biaya investasi pembangunan TPST serta perkiraan biaya operasional
  5. Analisis Lingkungan
- e. Menyusun Laporan Akhir (laporan studi kelayakan)
- f. Mempresentasikan hasil pekerjaan di depan tim teknis



#### **1.4. Landasan Hukum**

Landasan hukum peraturan perundangan :

- a. UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja,
- b. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan,
- c. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
- d. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
- e. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
- f. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,
- g. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- h. PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional,
- i. Perpres No. 54 tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- j. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- k. Permen PU No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Pengelolaan Persampahan,
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
- m. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah.
- n. Permen PU No. 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga,
- o. Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
- p. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam laporan akhir *Feasibility Study* (FS) TPST Semuntul meliputi:

##### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini menguraikan secara ringkas mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, landasan hukum penyusunan studi kelayakan (FS) Pembangunan TPST Semuntul, dan waktu pelaksanaan pekerjaan.

## **BAB II Metodologi**

Bab ini membahas mengenai pendekatan, metodologi pelaksanaan dan menguraikan aspek yang dinilai dalam melakukan studi kelayakan meliputi aspek teknis, aspek keuangan, aspek kelembagaan, aspek lingkungan, aspek sosial.

## **BAB III Gambaran Umum Wilayah Perencanaan**

Bab ini berisi tentang gambaran umum wilayah perencanaan seperti batas administrasi, letak geografis, hidrologi, topografi, klimatologi, fisiografi, geologi, dan hidrogeologi.

## **BAB IV Kondisi Eksisting Sistem Pengelolaan Sampah**

Bab ini berisikan kondisi eksisting system pengelolaan sampah TPST Semuntul meliputi aspek hukum/peraturan, kelembagaan, pembiayaan/keuangan, serta aspek teknis

## **BAB V Analisa Kelayakan Teknis TPST**

Bab ini berisikan hasil dari analisa kelayakan teknis TPST Semuntul .

## **BAB VI Analisa Kelayakan Lingkungan**

Bab ini berisikan hasil dari analisa kelayakan lingkungan TPST Semuntul.

## **BAB VII Analisis Kelayakan Kelembagaan**

Bab ini berisikan hasil dari analisa proses pengembangan kelembagaan TPST Semuntul.

## **BAB VIII Analisis Kelayakan Ekonomi**

Bab ini berisikan hasil analisa dari kebutuhan biaya investasi dan operasional TPST Semuntul

## **BAB IX Kesimpulan dan Rekomendasi**

Bab ini menguraikan kesimpulan kelayakan Pengembangan TPST Semuntul dan rekomendasi.

# BAB II

## TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Analisis Aspek Teknis

Perencanaan TPST perlu mempertimbangkan aspek-aspek mendasar yang dapat mempengaruhi keberlanjutan TPST. Ketentuan teknis perencanaan TPA yang menjadi landasan penyediaan infrastruktur TPST sangat dibutuhkan, terdiri dari:

- a. Rencana pengembangan kota dan daerah, tata guna lahan;
- b. Membuat energi *balance* dari sistem teknologi yang diusulkan;
- c. Kemampuan ekonomi pemerintah daerah untuk mengoperasikan dan memelihara TPST;
- d. Kondisi fisik lahan, ekonomi dan sosial di sekitar lokasi TPST;
- e. Kondisi timbulan, karakteristik dan komposisi sampah serta volume yang akan masuk ke TPST
- f. Rencana teknologi pengolahan sampah;
- g. Rencana pengelolaan residu;
- h. Rencana offtaker hasil olahan sampah.

Analisis pemilihan teknologi pengolahan sampah merupakan salah satu rangkaian paling penting dalam pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Semuntul. Persyaratan TPST sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 29 ayat 3 huruf d harus memenuhi persyaratan teknis seperti:

- a. luas TPST, lebih besar dari 20.000 m<sup>2</sup>;
- b. penempatan lokasi TPST dapat di dalam kota dan atau di TPA;
- c. jarak TPST ke permukiman terdekat paling sedikit 500 m;
- d. pengelolaan sampah di TPST dapat menggunakan teknologi;
- e. fasilitas TPST dilengkapi dengan ruang pemilah, instalasi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga.

Pengoperasian TPST sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 44 huruf a meliputi kegiatan:

- a. penanganan sampah;
- b. pemilahan sampah;
- c. pengolahan sampah organik;

- d. pendaur ulangan sampah non organik;
- e. pengelolaan sampah spesifik rumah tangga dan B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- f. pengumpulan sampah residu ke dalam container untuk diangkut ke TPA sampah.

## **2.2. Analisis Aspek Keuangan**

Metodologi dalam pelaksanaan Kelayakan ekonomi dan keuangan ini antara lain :

### **a. Tahap Pendahuluan**

Tahap pendahuluan dalam kegiatan ini meliputi :

- 1. Penyusunan Rencana Kegiatan;
- 2. Pengumpulan data primer dan sekunder;
- 3. Koordinasi dengan instansi terkait.

### **b. Tahap Pengumpulan Data**

Pengumpulan data primer dan sekunder yang berhubungan dengan kegiatan Perencanaan Pembangunan TPST baik data lapangan maupun literatur terkait, meliputi:

- 1. Pengumpulan data primer dan sekunder kondisi eksisting masing-masing kota dalam laporan realisasi anggaran 3 tahun terakhir;
- 2. Pengumpulan data CAPEX dan OPEX mengacu pada PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2021;
- 3. Penentuan data pendapatan (*offtaker*);
- 4. Penentuan data biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

### **c. Tahap Penyusunan Studi Kelayakan**

Analisis kelayakan setiap rencana lokasi TPST, meliputi :

- 1. Menghitung selisih antara manfaat ekonomi (output) dengan biaya ekonomi (input) untuk menghasilkan proyeksi manfaat ekonomi bersih;
- 2. Menghitung nilai sekarang (Present Value) dari proyeksi manfaat ekonomi bersih dengan melakukan *discounting* menggunakan *social discount rate*;
- 3. Menghitung EIRR dari proyeksi manfaat ekonomi bersih dan membandingkannya dengan *social discount rate*;
- 4. Menghitung *Payback Period* dengan melakukan perhitungan tingkat pengembalian modal;
- 5. Menghitung *Benefit Cost Ratio* dengan suatu ukuran perbandingan antara pendapatan dengan Total Biaya Produksi sebuah proyek;
- 6. Menghitung Analisis Sensitivitas dengan memperhitungkan pengaruh risiko yang mungkin terjadi terhadap kondisi penerimaan dan biaya;
- 7. Menghitung dan menganalisis kelayakan keuangannya;

8. Perhitungan kebutuhan tarif jasa layanan penanganan sampah dengan sistem pelayanan TPST;
9. Menganalisis kesiapan keuangan untuk pemerintah daerahnya.

### **2.3. Analisis Aspek Kelembagaan**

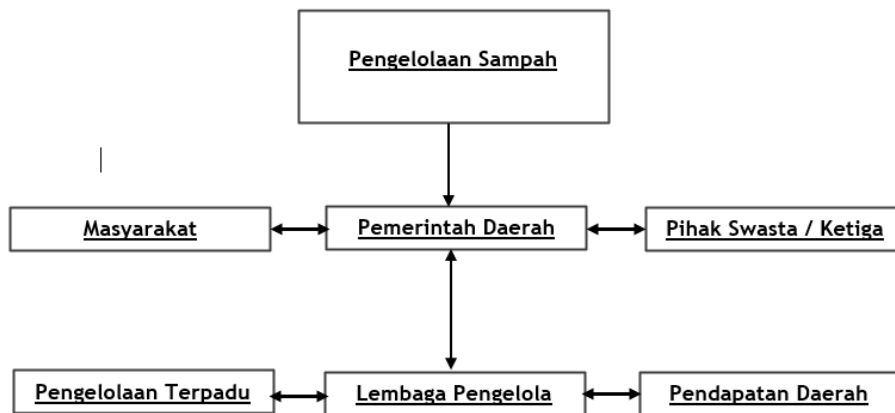
Analisis kelembagaan dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap situasi, struktur, perilaku, dan kinerja. Analisis situasi akan mendeskripsikan karakteristik inheren (yang melekat) pada sumberdaya. Situasi didefinisikan sebagai karakteristik yang merupakan sumber interdependensi. Analisis struktur akan menjelaskan kelembagaan/ aturan formal dan informal pengelolaan daerah penyangga. Selanjutnya, perilaku akan meninjau perilaku dari masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat. Kinerja akan menggambarkan kondisi pengelolaan terhadap sumberdaya eksisting pengolahan sampah apakah sudah cukup baik atau belum. Pengelolaan dapat dikatakan cukup baik apabila diketahui kepastian dalam pengelolaan sumberdaya tersebut. Kinerja merujuk pada konsep-konsep pengelolaan pengolahan sampah yang dapat merubah kinerja sebelumnya menjadi lebih baik. Untuk merubah perilaku masing-masing *stakeholder* sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik perlu dilakukan perubahan terhadap unsur-unsur kelembagaan yang meliputi tiga unsur utama, yakni:

- a. Batas yurisdiksi;
- b. Hak Kepemilikan; dan
- c. Aturan representasi.

Batas yurisdiksi akan menentukan siapa dan apa yang tercakup dalam suatu masyarakat. Konsep batas yurisdiksi dapat berarti batas wilayah kekuasaan atau batas otoritas yang dimiliki oleh suatu lembaga, atau mengandung makna kedua-duanya. Selanjutnya konsep pemilikan muncul dari konsep hak dan kewajiban yang didefinisikan atau diatur oleh hukum, adat dan tradisi, atau konsensus yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat dalam hal kepentingannya. Sedangkan aturan representasi mengatur permasalahan siapa yang berhak berpartisipasi terhadap apa dalam proses pengambilan keputusan. Diawali dari analisis sistem secara berjenjang untuk menjelaskan pemahaman dari perihal yang dikaji dengan 5 (lima) kriteria, yaitu :

- a. Kekuatan pengikat dalam dan antar kelompok atau tingkat;
- b. Frekuensi relatif dari oskilasi (guncangan);
- c. Cakupan dan waktu operasi;
- d. *Mekanisme Design-Build-Operate*;
- e. Liputan ; dan
- f. Hubungan fungsional.

Elemen sistem yang dianalisis dalam penelitian ini adalah lembaga yang terlibat serta kebutuhan program dalam hal ini kebijakan yang akan dijalankan. Berikut adalah gambaran struktur hierarki untuk konsep pengelolaan sampah terpadu yang akan berjalan:



**Gambar 2.1 Struktur Hierarki Pengelolaan Sampah dan Hasil Tujuan yang akan Dicapai**

#### **Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threads)**

Analisis SWOT (*Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats*) adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan alternatif kebijakan pengelolaan daerah penyangga TNKS. Analisis SWOT didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Analisis SWOT harus mempertimbangkan situasi dari faktor internal dan faktor eksternal pengelolaan daerah tersebut. Secara umum langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis SWOT adalah:

- a. Identifikasi kekuatan/ kelemahan dan peluang/ ancaman.  
Identifikasi dilakukan berdasarkan kondisi yang ada (*existing condition*). Hal ini diperlukan untuk mengetahui berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam membuat kebijakan pengelolaan daerah penyangga kedepan;
- b. Analisis SWOT.  
Hasil identifikasi diberi bobot/skor berdasarkan tingkat kepentingan dan kondisi eksisting pengelolaan dan pengolahan sampah saat ini. Bobot tertinggi diberikan untuk unsur SWOT yang mempunyai pengaruh penting bagi kebijakan pengelolaannya. Setelah masing-masing unsur SWOT diberi bobot, kemudian unsur tersebut dihubungkan keterkaitannya untuk memperoleh beberapa alternatif kebijakan. Bobot masing-masing kebijakan tersebut dijumlahkan untuk menghasilkan ranking alternatif kebijakan yang prioritas;
- c. Alternatif kebijakan hasil analisis SWOT.



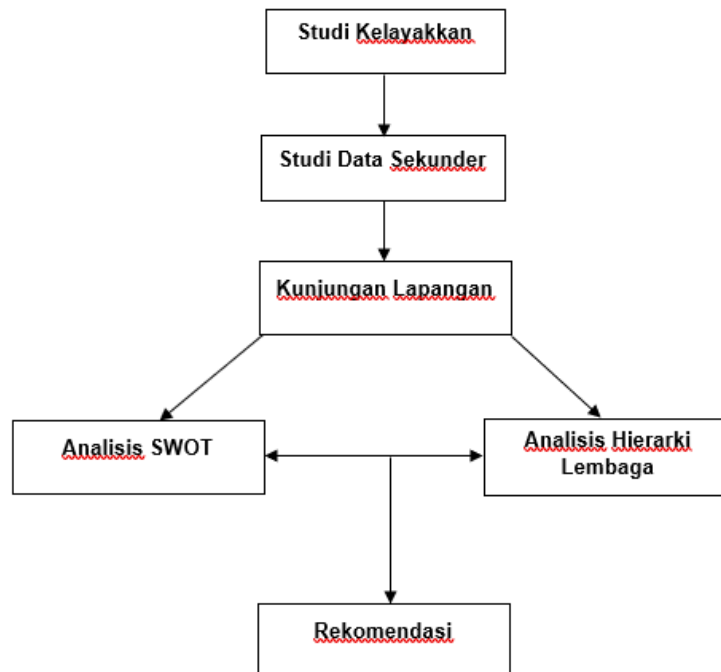
Alternatif kebijakan dihasilkan dari penggunaan unsur-unsur kekuatan untuk mendapatkan peluang yang ada, penggunaan kekuatan yang ada untuk menghadapi ancaman yang akan datang, pengurangan kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada dan pengurangan kelemahan yang ada untuk menghadapi ancaman yang akan datang. Kebijakan yang dihasilkan terdiri atas beberapa alternatif, sehingga untuk menentukan prioritas kebijakan yang harus dilakukan penjumlahan bobot yang berasal dari keterkaitan antara unsur-unsur SWOT yang terdapat dalam suatu alternatif kebijakan.

### **Skema Analisis Kelembagaan Dan Peraturan**

Pada kajian studi kelayakkan ini, akan meninjau kelayakkan dari masing-masing daerah terpilih terhadap kesiapan untuk pelaksanaan program. Tinjauan kesiapan dinilai berdasarkan keadaan aktual terhadap peraturan yang sudah ada, dan lembaga pengelola yang saat ini berjalan dalam pengelolaan sampah. Tujuan akhir daripada studi kelayakkan adalah untuk menimbang apakah daerah-daerah telah layak dan mampu mengaplikasikan keberlangsungan program.

Studi kelayakkan diawali dengan inventarisir data sekunder berupa peraturan, kajian rencana induk persampahan, data sumber daya manusia, dan kondisi teraktual mengenai pengelolaan sampah di tiap-tiap daerah terpilih. Setelah melakukan studi dan pratinjau terhadap data sekunder yang diberikan oleh masing-masing daerah, proses analisa berangkat kepada tinjauan lapangan berupa kunjungan dan wawancara kepada instansi pemerintahan daerah terkait dengan penelaahan secara mendalam untuk skema proses pengelolaan sampah dan usulan-usulan pengembangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah tersebut.

Proses inventarisir wawancara dan kunjungan setempat, kemudian diolah dengan sistem analisa SWOT dan hierarki kelembagaan untuk merumuskan ketentuan-ketentuan teraktual dalam pengelolaan sampah di masing-masing daerah. Hasil dari analisa tersebut kemudian menjadi poin-poin rekomendasi kepada pemerintah tiap-tiap daerah untuk menyiapkan segala aspek dari sisi peraturan, kelembagaan, guna menyokong keberlangsungan program pengelolaan sampah terpadu. Secara lebih rinci, proses skema analisa kelembagaan dan peraturan dapat dicermati pada gambar berikut:



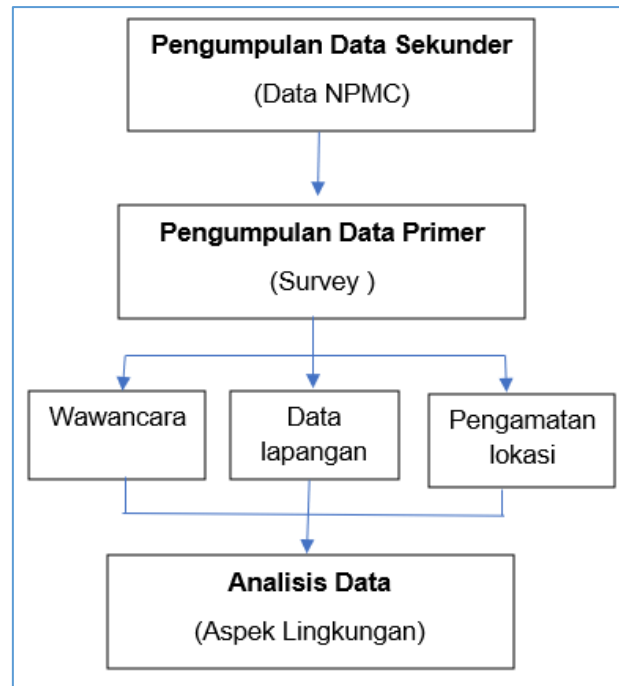
**Gambar 2.2 Skema Analisa Kelembagaan dan Peraturan**

#### 2.4. Analisis Aspek Lingkungan

Analisis kelayakan lingkungan di setiap lokasi perencanaan TPST untuk tahap pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi terdiri dari :

- Identifikasi potensi dampak dari rencana kegiatan setiap tahapan yang mempengaruhi rona lingkungan dari aspek geo fisika kimia, biologi, transportasi, sanitasi dan memberikan dampak sekunder pada masyarakat sekitar.
- Perkiraan perubahan rona lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan dan operasional TPST.
- Memberikan rencana penanganan/pengelolaan lingkungan pada setiap tahapan kegiatan untuk mencegah dan mengurangi dampak terhadap lingkungan yang bersinergi dengan dampak sosial.

Metode yang digunakan ada dengan cara pengumpulan data-data sekunder dan data sekunder, secara keseluruhan metodologi analisis aspek lingkungan dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 2.3 Skema Analisa Lingkungan**

## 2.5. Analisis Aspek Sosial

Tujuan dilaksanakan kajian dan analisis sosial untuk melihat kesiapan masyarakat (*community readiness*) dalam pelaksanaan pembangunan TPST, adalah :

- Mengidentifikasi Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah, untuk melihat kesiapan Masyarakat terhadap Pembangunan TPST, termasuk persepsi masyarakat terhadap pengelolaan Sampah terpadu.
- Mengidentifikasi risiko dan dampak sosial kegiatan (pada lahan, sekitar lahan dan akses jalan).
- Mengembangkan rencana penanganan risiko dan dampak sosial

Proses pengumpulan data dalam kegiatan kajian sosial ini terdiri dari :

- Pengumpulan data Sekunder

Dilakukan melalui Pengumpulan data statistik dari BPS kota/Kabupaten, Studi pustaka, studi aturan terkait pengelolaan sampah, Dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, dan hasil studi terdahulu.

- Pengumpulan data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif akan dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan kuisioner, untuk melihat pengetahuan, sikap dan perilaku dalam pengelolaan sampah, serta peran dan keterlibatan dalam pengelolaan sampah. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dan FGD kepada stakeholder terkait mengenai kondisi eksisting, rencana pembangunan dan aturan terkait pengelolaan sampah.

Diharapkan metode tersebut akan saling melengkapi dalam mengumpulkan dan menganalisis semua informasi yang dibutuhkan. Populasi dalam penelitian ini adalah salah satu Rumah Tangga di Kelurahan terdekat lokasi TPST, dengan pertimbangan masyarakat yang tinggal di area dekat lokasi akan mendapatkan dampak akibat pembangunan TPST, baik dampak sosial maupun ekonomi.

Populasi dalam penelitian ini adalah Rumah Tangga di Kelurahan terdekat lokasi TPST, dengan pertimbangan masyarakat yang tinggal di area dekat lokasi akan mendapatkan dampak langsung akibat pembangunan TPST, baik dampak sosial maupun ekonomi. Jumlah sampel ditentukan dengan memperhatikan jumlah penduduk dan Margin of Error, dengan menggunakan rumus statistik Slovin, yaitu  $n = N / (1 + (N \times e^2))$ ,  $n$  = angka responden,  $N$  = jumlah populasi,  $e$  = margin of error.

Pemilihan Responden dilakukan secara *Random Sampling*, dimana semua populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel, dan diharapkan sampel mewakili populasi sehingga bisa digeneralisasi dengan populasi. Hasil dari Analisis Kajian Sosial ini adalah kondisi Sosial Ekonomi, yang akan memberikan informasi mengenai gambaran umum dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi rencana pembangunan TPST, termasuk peran masyarakat dan swasta, persepsi masyarakat terhadap rencana pembangunan TPST, serta rencana mitigasi untuk mengurangi dampak sosial yang akan terjadi akibat pembangunan TPST.

# **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN**

### **3.1. Batas Administrasi**

Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah Kabupaten Banyuasin terbagi memiliki luas wilayah 12.551,156 Km<sup>2</sup> atau 1.183.299 Ha yang dalam 21 kecamatan terdiri dari 313 desa/kelurahan. Kecamatan Banyuasin II merupakan wilayah kecamatan terluas di Kabupaten Banyuasin dengan luas 3611,53 Km<sup>2</sup> atau sekitar 29,52% dari luas wilayah, sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Karang agung ilir dengan luas 139,39 Km<sup>2</sup> atau sekitar 1,18% dari luas wilayah Kabupaten Banyuasin. Batas-batas wilayah Kabupaten Banyuasin antara lain:

- a. Sebelah Barat : Kecamatan Sungai Lilin, Sungai Lais dan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin
- b. Sebelah Utara : Kab. Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Selat Bangka
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Pampangan dan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir
- d. Sebelah Selatan : Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Palembang, Kecamatan Sungai Rotan dan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim.

**Tabel 3.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Banyuasin**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah	
			(Km2)	Persentase (%)
1	Rantau Bayur	21	535,07	4,26
2	Betung	12	388,99	3,10
3	Suak Tapeh	11	322,51	2,57
4	Pulau Rimau	17	503,94	4,02
5	Tungkal Ilir	14	686,30	5,47
6	Selat Penuguan	12	136,39	1,09
7	Banyuasin 3	26	679,36	5,41
8	Sembawa	11	220,32	1,76
9	Talang Kelapa	19	478,85	3,82
10	Tanjung Lago	15	533,22	4,25
11	Banyuasin 1	13	214,70	1,71
12	Air Kumbang	16	343,43	2,74
13	Rambutan	20	586,82	4,68
14	Muara Padang	15	945,21	7,53

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah	
			(Km2)	Persentase (%)
15	Muara Sugihan	22	679,41	5,41
16	Makarti Jaya	12	327,17	2,61
17	Air Saleh	14	338,68	2,70
18	Banyuasin 2	10	3.611,53	28,77
19	Karang Agung Ilir	7	437,69	3,49
20	Muara Telang	16	364,16	2,90
21	Sumber Marga	10	217,38	1,73

### 3.2. Demografi

#### 3.2.1 Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Banyuasin pada tahun 2023 berjumlah 850,02 ribu jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 105,00 yang berarti secara rata-rata terdapat 105 hingga 106 penduduk laki-laki dari 100 penduduk perempuan. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Talang Kelapa dengan penduduk sebesar 153,66 ribu jiwa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Karang Agung Ilir dengan penduduk sebesar 11,80 ribu jiwa.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Banyuasin sebesar 67,72 jiwa per km<sup>2</sup> yang berarti secara rata-rata dalam 1 km<sup>2</sup> dihuni oleh 67 hingga 68 penduduk. Kecamatan dengan kepadatan penduduk terbesar adalah Kecamatan Talang Kelapa dengan kepadatan penduduk sebesar 320,90 jiwa per km<sup>2</sup>. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Banyuasin II dengan kepadatan penduduk sebesar 7,83 jiwa per km<sup>2</sup>.

**Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuasin Per Kecamatan Tahun 2023**

No	Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
1	Rantau Bayur	40.257	75,24	0,68
2	Betung	55.129	141,72	0,94
3	Suak Tapeh	19.351	60,00	0,95
4	Pulau Rimau	24.398	48,41	1,28
5	Tungkal Ilir	27.976	40,76	2,05
6	Selat Penuguan	22.852	167,35	1,24
7	Banyuasin 3	68.804	101,28	1,65
8	Sembawa	33.807	153,44	0,68
9	Talang Kelapa	153.662	320,90	1,58
10	Tanjung Lago	42.208	79,16	1,21
11	Banyuasin 1	57.244	266,61	1,37
12	Air Kumbang	28.013	81,57	1,39
13	Rambutan	43.621	74,33	0,66
14	Muara Padang	31.560	33,42	0,52



No	Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
15	Muara Sugihan	39.134	57,60	0,30
16	Makarti Jaya	23.065	70,50	0,04
17	Air Saleh	35.019	103,40	0,60
18	Banyuasin 2	28.294	7,83	0,04
19	Karang Agung Ilir	11.803	26,97	0,08
20	Muara Telang	39.590	108,72	1,50
21	Sumber Marga Telang	24.235	111,48	1,53

### 3.2.2 Kondisi Ekonomi

Kondisi kemampuan ekonomi penduduk berhubungan dengan pengeluaran kebutuhan pokok selama sebulan baik kebutuhan makanan maupun non makanan. Pengeluaran minimum ini dapat menunjukkan angka garis kemiskinan yang terdapat di wilayah Kabupaten Banyuasin. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan. Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Selama periode tahun 2016-2023, garis kemiskinan Kabupaten Banyuasin selalu mengalami kenaikan. Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Banyuasin terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 garis kemiskinan Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 381.473 per kapita per bulan. Hingga pada bulan Maret 2023 garis kemiskinan Kabupaten Banyuasin pada sebesar Rp 509.264,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp 31.871,00 dibandingkan Garis Kemiskinan Maret 2022 yang sebesar Rp 477.393,00. Kondisi pengeluaran minimum pada Masyarakat di Kabupaten Banyuasin periode Tahun 2016 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.3 Perkembangan Pengeluaran Minimum per kapita perbulan di Kabupaten Banyuasin Tahun 2016-2023**

No.	Tahun	Pengeluaran Minimum Sebulan dari Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Presentase Penduduk Miskin (%)
1	2016	Rp 337.391,00	96,40	11,72
2	2017	Rp 353.914,00	95,30	11,47
3	2018	Rp 381.437,00	95,29	11,32
4	2019	Rp 397.496,00	96,55	11,33
5	2020	Rp 429.816,00	96,27	11,17
6	2021	Rp 445.089,00	94,08	10,75
7	2022	Rp 477.393,00	88,55	10,00

No.	Tahun	Pengeluaran Minimum Sebulan dari Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Presentase Penduduk Miskin (%)
8	2023	Rp 509.294,00	85,88	9,58

*Sumber: diolah dari BPS, Kabupaten Banyuasin Dalam Angka 2024*

Salah satu variabel dari fokus kemampuan ekonomi daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita adalah variabel yang cukup penting dalam memantau perkembangan standar hidup penduduk di suatu wilayah. Dalam kenyataannya pengeluaran konsumsi perkapita berbanding lurus dengan pendapatan perkapita penduduk.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Banyuasin merupakan produsen padi terbesar Se-Sumatera sehingga menjadikan pertanian sebagai kategori terbesar dalam pembentukan PDRB. Disusul dengan kategori industri pengolahan, terutama industri makanan dan minuman yang produknya di pasarkan sampai keluar kabupaten dan provinsi. Kondisi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Banyuasin 2019 – 2023 sebagai berikut.

**Tabel 3.4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Banyuasin (miliar rupiah), 2019–2023**

No	Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022*)	2023**)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.870,42	6.912,37	7.252,13	7.420,62	7.584,55
B	Pertambangan dan Penggalian	1.402,50	1.380,91	1.390,32	1.404,62	1.422,96
C	Industri Pengolahan	4.707,63	4.712,48	4.816,78	5.123,77	5.485,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,14	16,60	17,24	17,83	18,50
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,00	3,09	3,02	3,05	3,09
F	Konstruksi	2.794,33	2.801,11	2.874,34	3.140,77	3.362,81
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.188,81	2.141,14	2.297,19	2.546,10	2.778,37
H	Transportasi dan Pergudangan	101,52	96,94	98,35	105,62	110,66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	86,66	80,88	86,05	96,30	105,12
J	Informasi dan Komunikasi	374,16	429,64	451,96	487,82	508,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	58,11	59,44	60,81	61,24	63,20

No	Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022*)	2023**)
L	Real Estate	173,37	172,10	177,77	184,49	197,02
M,N	Jasa Perusahaan	2,90	2,88	2,89	2,91	2,94
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan, Sosial Wajib	482,12	483,12	503,03	511,95	542,57
P	Jasa Pendidikan	545,42	530,80	554,58	577,77	604,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan, Sosial	93,82	100,30	103,98	107,38	107,39
R,S ,T,U	Jasa Lainnya	73,53	75,77	77,19	79,35	81,44
<b>Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product</b>		<b>19 973,44 19</b>	<b>999,57 20</b>	<b>767,64 21</b>	<b>871,60 22</b>	<b>978,68</b>

Catatan/Note: \*) Angka Sementara/ Preliminary Figure; \*\*) Angka Sangat Sementara/ Very Preliminary Figure

Sumber: diolah dari BPS, Kabupaten Banyuasin Dalam Angka, 2024

Angka PDRB berdasarkan harga konstan 2010 di Kabupaten Banyuasin mengalami kenaikan dari 21.871,60 miliar rupiah pada tahun 2022 menjadi 22.978,68 miliar rupiah pada tahun 2023. Pertumbuhan PDRB cukup signifikan disebabkan oleh meningkatnya nilai produksi dari pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Banyuasin tahun 2023 sebesar 37.439,52 miliar rupiah. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi penyumbang PDRB terbesar dengan nilai 11.667.24 miliar rupiah atau 31,16 persen dari total PDRB tahun 2023. Sektor kedua penyumbang PRDB terbesar adalah sektor Industri Pengolahan dengan sumbangan sebesar 26,83 persen atau senilai 10.043,97 miliar rupiah. Secara total laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2023 sebesar 5,06 persen.

Selain untuk menghitung kinerja perekonomian, angka PDRB dapat juga digunakan untuk mengestimasi laju inflasi. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Banyuasin Inflasi pada periode 2018-2019 sangat berfluktuatif, inflasi dipengaruhi oleh perubahan harga minyak mentah, terlihat dari inflasi yang cukup tinggi ditahun 2018 yang mencapai 4,09 persen dan sampai tahun 2021 di angka 1,84 dan tahun 2022 mengalami peningkatan 5,95 persen. Angka inflasi ini didapatkan dengan memperhatikan inflasi yang terjadi pada Kota Palembang.

**Tabel 3.5 Laju Inflasi Kabupaten Banyuasin 2018-2022**

Tahun	Inflasi	
	Target	Realisasi
2018	2,37	4,09
2019	2,36	3,04
2020	2,35	1,49
2021	2,34	1,84
2022	2,33	1,84

Sumber : RPD Kabupaten Banyuasin, 2024-2026

### 3.2.3 Kondisi Sosial dan Budaya

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyuasin tahun 2023, mayoritas penduduk Kabupaten Banyuasin menganut agama islam sebanyak 833.934 jiwa atau 98,10 % dari total penduduk pada tahun 2023, diikuti agama Kristen protestan 8.426 jiwa atau 0,99% dan hindu sebanyak 3.846 jiwa atau 0,45%.

Indeks Pembangunan Manusia-IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang Apabila dilihat perkembangan angka IPM tiap tahun, tampaknya kemajuan yang dicapai Banyuasin dalam pembangunan manusia tidak terlalu signifikan. Lambatnya kenaikan IPM ini dapat dipahami, mengingat dampak dari investasi di sektor kesehatan dan pendidikan baru akan terlihat secara nyata dalam jangka panjang.

**Tabel 3.6 IPM Kabupaten Banyuasin yang dihitung dengan Metode Baru, 2019-2022**

Tahun	2019	2020	2021	2022
Harapan Hidup (Tahun)	68,76	68,97	69,06	69,43
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,73	11,75	11,77	11,95
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,19	7,20	7,44	7,45
Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rp)	10.135	9.850	9.860	10.299
IPM	66,9	66,74	67,13	67,93

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Banyuasin 2023

Apabila dilihat faktor pencapaian nilai IPM Kabupaten Banyuasin capaian Pendidikan, masyarakat Kabupaten Banyuasin memang masih di bawah Provinsi Sumatera Selatan dan nasional. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Banyuasin baru pada angka 7,45 tahun ini masih jauh dibawah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 sebesar 8,37 Tahun dan Rata-rata lama sekolah nasional pada 8,69 Tahun. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyuasin sebesar 11,95 tahun sedangkan Harapan lama sekolah sumsel sudah pada 12,55 tahun dan Harapan lama sekolah nasional pada 13,10 tahun.

### 3.2.4 Kondisi Pemerintahan

Kabupaten Banyuasin terdiri dari 21 kecamatan yang terbagi menjadi 288 desa dan 25 kelurahan. Masing-masing desa dan kelurahan di dalamnya tersusun atas dusun, lingkungan maupun rukun warga dan sebagian masih dibagi lagi kedalam rukun tetangga. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin sebanyak 45 orang. Mayoritas anggota DPRD tersebut berasal dari Partai Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jumlah pegawai negeri sipil pada tahun 2023 di Kabupaten Banyuasin berjumlah 6.636 orang yang terdiri dari 2.536 laki-laki dan 4.100 perempuan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuasin tahun 2023 sebesar 274 milyar menyumbang 12,23 persen dari total pendapatan. sekitar 56 persen anggaran belanja digunakan untuk belanja tidak langsung utamanya belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja batuan sosial, dan belanja bantuan keuangan.

**Tabel 3.7 Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banyuasin**  
**Tahun 2022-2023**

Anggaran	2022	2023
<b>Pendapatan</b>	<b>Rp 2.065.089.876,00</b>	<b>Rp 2.244.485.666,00</b>
Pendapatan asli daerah	Rp 253.097.194,00	Rp 274.544.757,00
Dana Perimbang	Rp 1.449.577.068,00	Rp 1.627.616.444,00
Lain-lain Pendapatan Sah	Rp 362.415.614,00	Rp 342.324.465,00
<b>Belanja</b>	<b>Rp 2.266.665.418.754,00</b>	<b>Rp 2.493.480.652.043,00</b>
Belanja Tidak Lansung	Rp 1.280.600.613.565,00	Rp 1.403.850.625.742,00
Belanja Langsung	Rp 986.064.805.188,00	Rp 1.089.630.026.30,00

Sumber : BPS, Kabupaten Banyuasin Dalam Angka 2024

### 3.2.5 Kondisi Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2023 sebanyak 408.508 jiwa. Komponen pembentukan angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada tahun 2023, sebanyak penduduk yang bekerja 96,65 persen dan sebanyak 3,34 persen yang menganggur. Menurut data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Banyuasin pada tahun 2023 sebesar 3.433.490 rupiah.

**Tabel 3.8 Ketenagakerjaan Kabupaten Banyuasin, 2023**

Variabel Ketenagakerjaan	2023
Angkatan Kerja (jiwa)	408 508
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK (%)	60,58
Penduduk Yang Bekerja < 35 Jam Seminggu (%)	96,65
Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	3.34
Tingkat Kesempataan Kerja/TKK (%)	96,65
UMR (Rp)	3.433.490



Sumber : BPS, Kabupaten Banyuasin Dalam Angka 2024

### 3.2.6 Kondisi Kesehatan Masyarakat

Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan manusia. Bila pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka secara langsung atau tidak langsung akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator bidang kesehatan meliputi antara lain indikator Angka Harapan Hidup Kabupaten Banyuasin mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 68,76 tahun menjadi 69,43 tahun atau meningkat lebih kurang 0,67 tahun, Angka Kematian Ibu Melahirkan juga mengalami penurunan jika dibandingkan sepanjang tahun 2019 sampai 2021 yang berada diatas angka 100 orang namun tahun 2022 menjadi 68,221, Prevalensi balita gizi kurang Banyuasin juga mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 2,80 yang, Angka Kematian Bayi, juga mengalami penurunan di angka 2,977 pada tahun 2022 jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 3,06 per 1000 kelahiran hidup, Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) mengalami peningkatan menjadi 96,07 persen meningkat jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 90,55 persen.

**Tabel 3.9 Indikator Bidang Kesehatan di Kabupaten Banyuasin Tahun 2019–2022**

Indikator	Satuan	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Angka Harapan Hidup	Tahun	68.76	68.97	69.06	69.43
Angka Kematian Ibu Melahirkan	per 100.000	108	137,54	130,31	68,221
Prevalensi Balita gizi kurang	%	3,1	6,1	2,23	2,80
Angka kematian Bayi	Per 1000 kelahiran hidup	3,44	4,9	3,06	2,977
Cakupan Desa /Kelurahan Universal Child Immunization	%	97	96,1	90,55	96,07

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, 2023

Selain Indikator diatas, salah satu aspek penting untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat adalah adanya sarana prasarana kesehatan yang memadai. Tahun 2022, terdapat 6 rumah sakit, 23 poliklinik, 35 puskesmas, 74 pukesmas pembantu dan 18 apotek di Kabupaten Banyuasin. Terdapat 85 orang tenaga dokter, 344 orang tenaga perawat, 1004 orang tenaga kebidanan, 52 orang tenaga kefarmasian serta 55 orang ahli gizi.

**Tabel 3.10 Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Banyuasin, 2022**

Fasilitas kesehatan	2022
Rumah Sakit	6
Rumah Sakit Bersalin	0
Poliklinik	23



<b>Fasilitas kesehatan</b>	<b>2022</b>
Puskesmas	35
Puskesmas Pembantu	74
Apotek	18
<b>Tenaga Kesehatan</b>	
Dokter	85
Peawat	344
Bidan	1004
Farmasi	52
Ahli Gizi	55

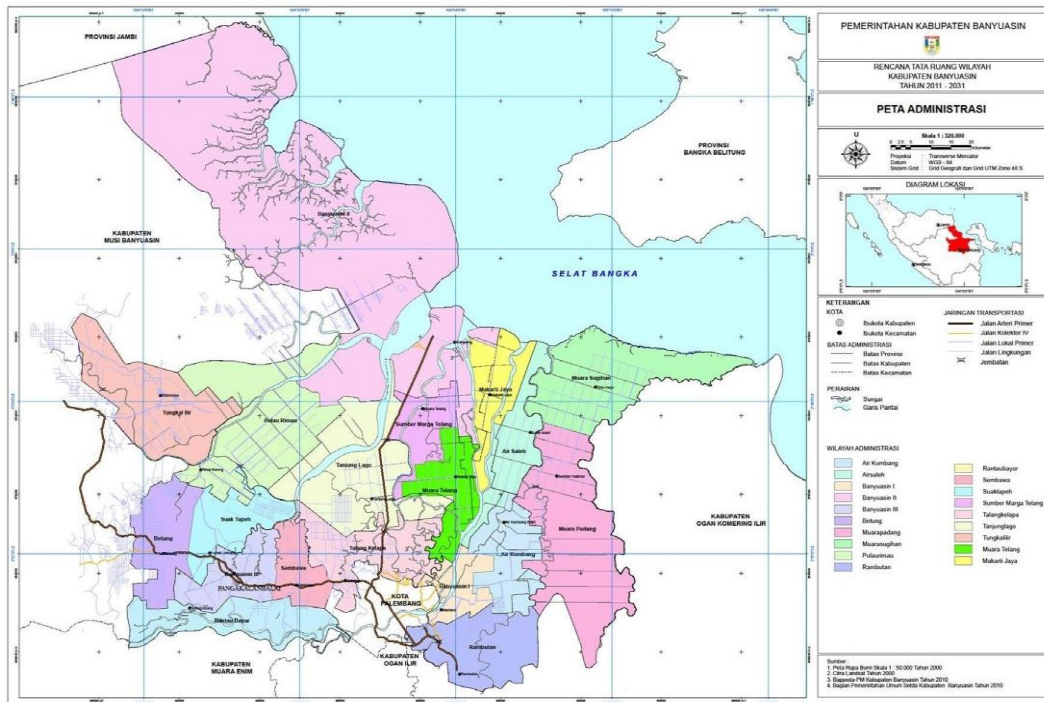
*Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Banyuasin, 2023*

### **3.3. Kondisi Fisik**

#### **3.3.1 Letak Geografis**

Secara geografis, Kabupaten Banyuasin terletak di jalur Lintas Timur Sumatera pada posisi antara 1,30° - 4,0° Lintang Selatan dan 104° 00' - 105° 35' Bujur Timur yang terbentang mulai dari bagian tengah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bagian Timur. Kabupaten Banyuasin merupakan daerah hasil pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin yang hampir seluruhnya merupakan wilayah pasang surut. Letak Geografis Kabupaten Banyuasin yang demikian menempatkan Kabupaten Banyuasin pada posisi potensial dan strategis dalam hal perdagangan dan industri, maupun pertumbuhan sektor-sektor pertumbuhan baru. Kondisi ini dan posisi Kabupaten Banyuasin dengan ibukota Pangkalan Balai yang terletak di Jalur Lintas Timur. Selain itu Kabupaten Banyuasin merupakan daerah penyelenggara pertumbuhan Kota Palembang terutama untuk sektor industri. Disisi lain bila dikaitkan dengan rencana Kawasan Industri dan Pelabuhan Tanjung Api-api Kabupaten Banyuasin sangat besar peranannya bagi kabupaten di sekitarnya sebagai pusat industri hilir, jasa distribusi produk sumber daya alam baik pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, dan pertambangan.

# PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN (FS) TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST) SEMUNTUL KABUPATEN BANYUASIN



**Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Banyuasin**

*Sumber: RTRW Kab. Banyuasin tahun 2010 – 2030*

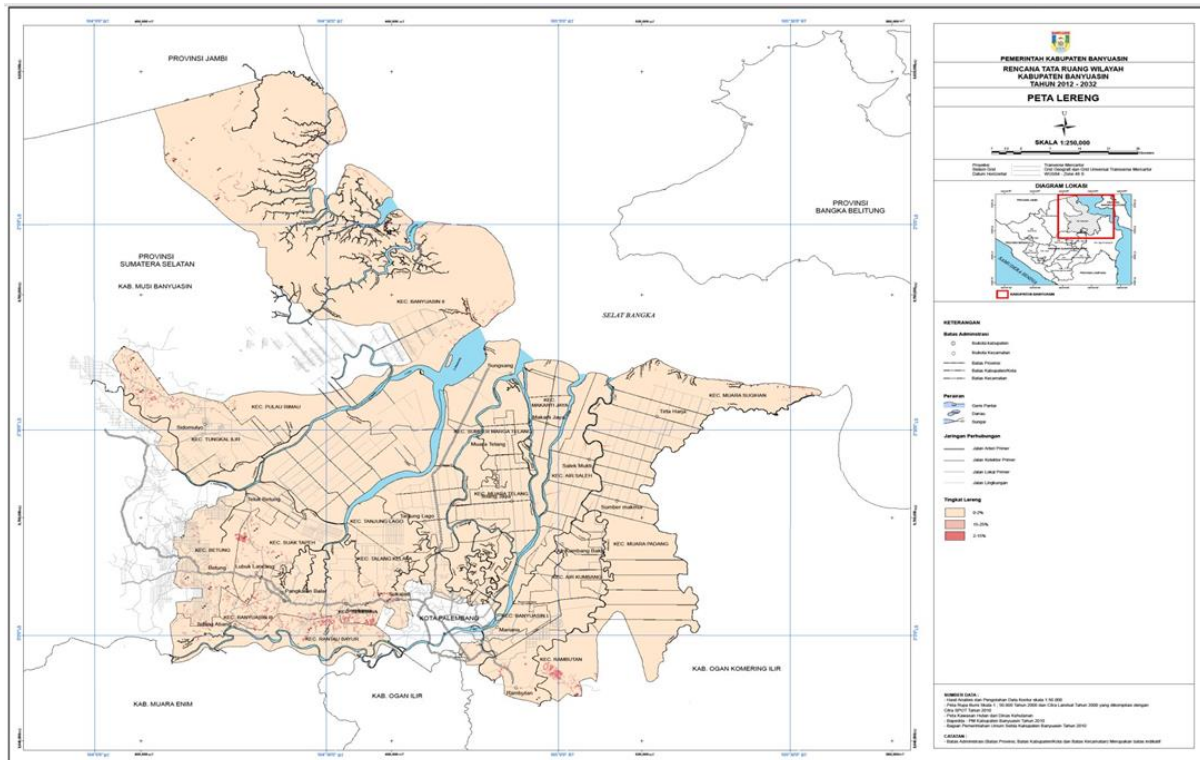
### 3.3.2 Hidrologi

Wilayah Kabupaten Banyuasin berdasarkan kondisi hidrologi sifat tata air, dapat dibedakan menjadi daerah dataran kering dan daerah dataran basah yang sangat dipengaruhi oleh pola aliran sungai dan pasang surut. Aliran sungai di daerah dataran basah pola alirannya rectangular dan di daerah dataran kering pola alirannya dendritic. Terkait kondisi hidrologi, Kabupaten Banyuasin terbagi kedalam 5 wilayah daerah aliran sungai yang masing-masing Das Bangke meliputi Kawasan Taman Nasional Sembilang, Das Banyuasin yang merupakan Das terbesar meliputi Kecamatan Tungkal Ilir, Pulau Rimau, Suak Tapeh, Sembawa, Betung, Banyuasin III, Tanjung Lago dan bagian selatan Banyuasin II, Das Benawang meliputi sepanjang wilayah timur Kecamatan Muara Sugihan, Sumber Marga Telang dan Muara Padang, Das Sembilang yang meliputi bagian utara kawasan Taman Nasional Sembilang dan Das Musi yang meliputi Kecamatan Rambutan, Banyuasin I, Air Kumbang, Talang Kelapa, Makarti Jaya, Muara Telang, Air Salek, Tanjung Lago, Rantau bayur serta sebagian wilayah di Kecamatan Banyuasin II.

### 3.3.3 Topografi

Kabupaten Banyuasin memiliki topografi 80% wilayah datar berupa lahan rawa pasang surut dan rawa lebak, sedangkan yang 20 % lagi berombak sampai bergelombang berupa lahan kering dengan sebaran ketinggian 0-40 meter diatas permukaan laut. Lahan rawa pasang surut yang terletak di sepanjang Pantai Timur sampai ke pedalaman meliputi wilayah

Kecamatan Muara Padang, Makarti Jaya, Muara Telang, Banyuasin II, Pulau Rimau, Air Saleh, Muara Sugihan, Sebagian Kecamatan Talang Kelapa, Betung dan Tungkal Ilir. Selanjutnya lahan rawa lebak terdapat di Kecamatan Rantau Bayur, sebagian Kecamatan Rambutan, sebagian kecil Kecamatan Banyuasin I. Sedangkan lahan kering dengan topografi agak bergelombang terdapat di sebagian besar Kecamatan Betung, Sembawa, Suak Tapeh, Banyuasin III, Talang Kelapa dan sebagian kecil Kecamatan Rambutan. Gambaran kondisi topografi dan kemiringan lahan di Kabupaten Banyuasin dapat di lihat pada **Gambar 3.3**



**Gambar 3.2 Peta Topografi Kabupaten Banyuasin**

Sumber : RTRW Kab. Banyuasin tahun 2010 – 2030

### 3.3.4 Klimatologi

Seperti kebanyakan kondisi klimatologi di wilayah Indonesia, Wilayah Kabupaten Banyuasin memiliki tipe iklim B1 menurut Klasifikasi Oldemand dengan suhu rata-rata 28,72 hingga 30,36 Celcius dan kelembaban rata-rata dan kelembaban relatif 78,98 % - 83,85 % dengan rata-rata curah hujan 3.250,2 mm/tahun.

**Tabel 3.11 Rata-Rata Suhu, Kelembapan, dan Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Banyuasin 2023**

No	Bulan	Suhu (°C)	Kelembapan (%)	Curah Hujan (mm/tahun)
1	Januari	28.3	79.9	284.5
2	Februari	29.1	77.3	230.7
3	Maret	29.2	77.9	304
4	April	30.2	76.4	417.9

No	Bulan	Suhu (°C)	Kelembapan (%)	Curah Hujan (mm/tahun)
5	Mei	30.7	75.4	247.5
6	Juni	30.3	75.1	135.7
7	Juli	30.0	76.9	133.1
8	Agustus	30.7	74.4	170.9
9	September	31.5	65.2	163.1
10	Oktober	32.2	65.4	578.1
11	Nopember	30.6	75	250.1
12	Desember	29.6	79.9	334.6
<b>Rata-rata</b>		<b>30.2</b>	<b>74.9</b>	<b>270.85</b>

Sumber : Kabupaten Banyuasin Dalam Angka Tahun 2023

### 3.3.5 Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Banyuasin akan di gambarkan melalui stratigrafi penyusunnya yang terdiri dari aluvium, batu lempung, batu pasir, batu sabak, endapan rawa, filit dan granit.

Aluvium endapan : tersebar di seluruh Kecamatan danau dan Pantai

Batu Lempung, Batu : tersebar di sebagian Kecamatan Banyuasin Dua, Pulau Rimau, Lanau, Batu Pasir Tungkal Ilir, Betung, Banyuasin III, Rantau Bayur dan Suak Tapeh

Batu Pasir, Batu : tersebar di sebagian Kecamatan Pulau Rimau Lumpur dan Batu Bara

Batu Sabak, Filit dan ; tersebar di sebagian Kecamatan Tanjung Lago Batu Lumpur

Endapan Rawa ; tersebar di selatan bagian timur Kabupaten Banyuasin yaitu Kecamatan Betung, Suak Tapeh, Banyuasin III, Talang Kelapa dan Rantau Bayur

Filit dan Batu Pasir ; tersebar di sebagian kecil wilayah perbatasan Kecamatan Tanjung Lago dan Kecamatan Pulau Rimau

Granir, Granodiorit, ; tersebar di sebagian Kecamatan Pulau Rimau, Banyuasin II, Diorit Tanjung Lago dan Rambutan





dalam hal arahan struktur tata ruang, arahan pola ruang kawasan lindung, kawasan budidaya.

- c. Kecenderungan perkembangan sistem pusat-pusat permukiman perdesaan dan perkotaan di wilayah Kabupaten Banyuasin. Pusat-pusat permukiman yang belum ditetapkan fungsinya dalam RTRW Provinsi Banyuasin akan ditetapkan fungsinya Dalam RTRW Kabupaten Banyuasin menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- d. Posisi strategis pusat-pusat permukiman eksisting yang didukung dengan optimalisasi pelayanan sistem transportasi darat dan laut yang ada saat ini maupun yang direncanakan pada masa mendatang.

### **Tujuan Penataan Ruang**

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah untuk mempercepat pertumbuhan Kabupaten Banyuasin melalui pengembangan pertanian, perikanan, industri dan pertambangan untuk pembangunan berkelanjutan, guna:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:

- a. Pembentukan dan pengembangan pusat pelayanan kegiatan yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten;
- b. Peningkatan aksesibilitas, pelayanan sarana dan prasarana wilayah;
- c. Pemantapan, perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan lindung;
- d. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya yang ramah lingkungan; dan
- e. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

### **Strategi Penataan Ruang**

- a. Strategi pembentukan dan pengembangan pusat pelayanan kegiatan yang mencakup seluruh wilayah kabupaten, meliputi :
  - 1) Mengembangkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sesuai arahan RTRWN;
  - 2) Mengembangkan pusat kegiatan lokal (PKL) wilayah kabupaten;
  - 3) Menetapkan pusat kegiatan sebagai Pusat Pengembangan Kawasan (PPK); dan
  - 4) Menetapkan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- b. Strategi Peningkatan aksesibilitas, pelayanan sarana dan prasarana wilayah, meliputi :



- 1) Mengembangkan transportasi secara terintegrasi dalam pengembangan jalan, jalan kereta api, terminal dan terminal khusus yang menghubungkan antar pusat kegiatan dengan *hinterland*-nya;
  - 2) Mengembangkan rute-rute pelayanan moda transportasi publik yang menghubungkan antar pusat pelayanan kegiatan dengan permukiman;
  - 3) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pelayanan umum yang merata keseluruh wilayah Kabupaten; dan
  - 4) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dalam mendorong pengembangan kawasan strategis kabupaten dalam mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.
- c. Strategi pemantapan, perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan lindung, meliputi :
- 1) Mempertahankan kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
  - 2) Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun;
  - 3) Mengembangkan kerjasama antar kabupaten perbatasan dalam meningkatkan fungsi lindung; dan
  - 4) Menetapkan tata batas kawasan lindung dengan budidaya.
- d. Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya yang ramah lingkungan, meliputi :
- 1) Mengembangkan kawasan budidaya sektor kehutanan, pertanian, industri, perikanan, pertambangan, pariwisata dan permukiman yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - 2) Meningkatkan produksi dan produktivitas kawasan pertanian, kehutanan, dan perikanan guna menjaga ketahanan pangan dan mendukung pembangunan berkelanjutan;
  - 3) Mengembangkan kegiatan industri dan sarana prasarana pendukung industri terpadu yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk mendukung peningkatan nilai tambah, produktivitas dan perekonomian masyarakat Kabupaten;
  - 4) Mengembangkan pengelolaan potensi sumber daya alam secara berimbang dan berkelanjutan dengan memprioritaskan aspek keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup;
  - 5) Mengembangkan kawasan pariwisata; dan
  - 6) Mengembangkan budidaya pertanian tanaman pangan.
- e. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, meliputi :
- 1) Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
  - 2) Mengembangkan budidaya secara selektif di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan

- 3) Mengembangkan kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga.

**Arah Pengembangan Tata Ruang**

Arah pengembangan tata ruang wilayah berkaitan dengan penetapan rencana peran dan fungsi perkotaan di Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019-2039, RTRW Kabupaten Banyuasin 2019 - 2039 adalah sebagai berikut:

**a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)**

Peran perkotaan Banyuasin dan sekitarnya ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala beberapa Provinsi dan/atau beberapa Kabupaten/Kota. Pusat kegiatan yang ditetapkan terletak di PKN Kawasan Perkotaan Palembang – Betung – Indralaya – Kayu Agung.

**b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)**

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL meliputi Perkotaan Sungsang Kecamatan Banyuasin II dan Perkotaan Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III.

**c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)**

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK, meliputi :

- 1) Perkotaan Mariana Kecamatan Banyuasin I
- 2) Perkotaan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa
- 3) Perkotaan Telang Jaya Kecamatan Muara Telang
- 4) Perkotaan Jakabaring Kecamatan Rambutan
- 5) Perkotaan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya
- 6) Perkotaan Saleh Mukti Kecamatan Air Saleh
- 7) Perkotaan Sidomulyo Kecamatan Tungkal Ilir

**d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)**

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala dusun atau kampung. Pusat Kegiatan yang ditetapkan sebagai PPL, meliputi :

- 1) Perkotaan Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur
- 2) Perkotaan Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago
- 3) Perkotaan Teluk Betung Kecamatan Pulau Rimau

- 4) Perkotaan Sumber Makmur Kecamatan Muara Padang
- 5) Perkotaan Tirta Harja Kecamatan Muara Sugihan
- 6) Perkotaan Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh
- 7) Perkotaan Sembawa Kecamatan Sembawa
- 8) Perkotaan Muara Telang Kecamatan Sumber Marga Telang
- 9) Perkotaan Wonodadi Kecamatan Selat Penuguan
- 10) Perkotaan Jati Sari Kecamatan Karang Agung Ilir
- 11) Perkotaan Air Kumbang Bakti di Kecamatan Air Kumbang.

Kabupaten Banyuasin memiliki wilayah perkotaan dan perdesaan, klasifikasi wilayah mengacu pada RTRW terbaru Kabupaten Banyuasin yaitu Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019-2039 dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 120 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Desa Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia. Data mengenai klasifikasi perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Banyuasin selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN (FS)  
TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST) SEMUNTUL**  
KABUPATEN BANYUASIN

**Tabel 3.12 Klasifikasi Desa Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Banyuasin**

No	Kecamatan/Kelurahan/Desa	Klasifikasi	No	Kecamatan/Kelurahan/Desa	klasifikasi
<b>1</b>	<b>Rantau Bayur</b>			8. Bengkuang	Pedesaan
	1. Muara Arab	Pedesaan		9. Durian Daun	Pedesaan
	2. Paldas	Pedesaan		10. Meranti	Pedesaan
	3. Tanjung Pasir	Pedesaan		11. Suka Raja	Pedesaan
	4. Tanjung Tiga	Pedesaan			
	5. Rantau Bayur	Pedesaan			
	<b>6. Tebing Abang</b>	<b>Perkotaan</b>	<b>4</b>	<b>Pulau Rimau</b>	
	7. Pagar Bulan	Pedesaan		1. Tabuan Asri	Pedesaan
	8. Lubuk Rengas	Pedesaan		<b>2. Teluk Betung</b>	<b>Perkotaan</b>
	9. Lebung	Pedesaan		3. Banjar Sari	Pedesaan
	10. KemangBejalu	Pedesaan		4. Buana Mukti	Pedesaan
	11. Tanjung Menang	Pedesaan		5. Tirta Mulya	Pedesaan
	12. Sri Jaya	Pedesaan		6. Senda Mukti	Pedesaan
	13. Sejangung	Pedesaan		7. Budi Asih	Pedesaan
	14. Sungai Pinang	Pedesaan		8. Wonosari	Pedesaan
	15. Semuntul	Pedesaan		9. Majatra	Pedesaan
	16. Talang Kemang	Pedesaan		10. Rukun Makmur	Pedesaan
	17. Rantau Harapan	Pedesaan		11. Wana Mukti	Pedesaan
	18. Sungai Lilin	Pedesaan		12. Sumber Mulya	Pedesaan
	19. Suka Rela	Pedesaan		13. Rawa Banda	Pedesaan
	20. Penandingan	Pedesaan		14. Nunggal Sari	Pedesaan
	21. Sungai Naik	Pedesaan		15. Dana Mulya	Pedesaan
				16. Sumber Rejeki	Pedesaan
				17. Mukut	Pedesaan
<b>2</b>	<b>Betung</b>				
	1. Taja Indah	Pedesaan			
	2. Taja Mulya	Pedesaan			
	3. Taja Raya I	Pedesaan			
	4. Pulau Rajak	Pedesaan			
	5. Lubuk Karet	Pedesaan			
	<b>6. Betung</b>	<b>Perkotaan</b>			
	<b>7. Bukit</b>	<b>Perkotaan</b>			
	8. Sri Kembang	Pedesaan			
	9. Taja Raya II	Pedesaan			
	10. Suka Mulya	Pedesaan			
	11. Rimba Asam	<b>Perkotaan</b>			
<b>3</b>	<b>Suak Tapeh</b>		<b>5</b>	<b>Tungkal Ilir</b>	
	1. Talang Ipuh	Pedesaan		1. Teluk Tenggulang	Pedesaan
	2. Air Senggeris	Pedesaan		2. Suka Mulya	Pedesaan
	<b>3. Lubuk Lancang</b>	<b>Perkotaan</b>		3. Suka Raja	Pedesaan
	<b>4. Biyuku</b>	<b>Perkotaan</b>		4. Karang Anyar	Pedesaan
	5. Rimba Terap	Pedesaan		5. Karang Mulya	Pedesaan
	6. Sedang	Pedesaan		6. Karang Asem	Pedesaan
	7. Tanjung Laut	Pedesaan		7. Marga Rahayu	Pedesaan
				8. Bumi Serdang	Pedesaan
				<b>9. Sido Mulyo</b>	<b>Perkotaan</b>
				10. Keluang	Pedesaan
				11. Bentayan	Pedesaan
				12. Panca Mulya	Pedesaan
				13. Suka Jaya	Pedesaan
				14. Suka Karya	Pedesaan
			<b>6</b>	<b>Selat Penuguan</b>	
				1. Sumber Rejo	Pedesaan
				2. Sumber Agung	Pedesaan
				<b>3. Wonodadi</b>	<b>Perkotaan</b>

**PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN (FS)  
TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST) SEMUNTUL**  
KABUPATEN BANYUASIN

No	Kecamatan/Kelurahan/Desa	klasifikasi	No	Kecamatan/Kelurahan/Desa	Klasifikasi
	4. Songo Makmur	Pedesaan		6. Purwosari	Perkotaan
	5. Bumi Rejo	Pedesaan		7. Limbang Mulya	Pedesaan
	6. Mekar Sari	Pedesaan		8. Sako Makmur	Pedesaan
	7. Sumber Mukti	Pedesaan		9. Pulau Muning	Pedesaan
	8. Kelapa Dua	Pedesaan		10. Muara Damai	Pedesaan
	9. Penuguan	Pedesaan		11. Santan Sari	Pedesaan
	10. Ringin Harjo	Pedesaan			
	11. Karang Manunggal	Pedesaan	9	Talang Kelapa	
	12. Purwodadi	Pedesaan		1. Air Batu	Perkotaan
				2. Sukamoro	Perkotaan
7	Banyuasin III			3. Sukajadi	Perkotaan
	1. Galang Tinggi	Pedesaan		4. Pangkalan Benteng	Perkotaan
	2. Petaling	Pedesaan		5. Gasing	Perkotaan
	3. Sidang Mas	Pedesaan		6. Kenten	Perkotaan
	4. Ujung Tanjung	Pedesaan		7. Sungai Rengit	Pedesaan
	5. Rimba Alai	Pedesaan		8. Talang Buluh	Perkotaan
	6. Terentang	Pedesaan		9. Tanah Mas	Perkotaan
	7. Tanjung Beringin	Pedesaan		10. Kenten Laut	Perkotaan
	8. Pelajau	Pedesaan		11. Talang Keramat	Perkotaan
	9. Regan Agung	Pedesaan		12. Sungai Rengit Murni	Pedesaan
	10. Pelajau Ilir	Pedesaan		13. Air Batu Jaya	Perkotaan
	11. Lubuk Saung	Pedesaan		14. Rawa Maju	Perkotaan
	12. Mulya Agung	Perkotaan		15. Sukajadi Timur	Perkotaan
	13. Pangkalan Balai	Perkotaan		16. Sei Sedapat	Perkotaan
	14. Seterio	Pedesaan		17. Azhar Permai	Perkotaan
	15. Sri Bandung	Pedesaan		18. Tanah Mas Indah	Perkotaan
	16. Tanjung Menang	Pedesaan		19. Keramat Jaya	Perkotaan
	17. Suka Mulya	Pedesaan			
	18. Kayuara Kuning	Perkotaan	10	Tanjung Lago	
	19. Tanjung Agung	Pedesaan		1. Sebalik	Pedesaan
	20. Pangkalan Panji	Pedesaan		2. Tanjung Lago	Perkotaan
	21. Langkan	Pedesaan		3. Manggar Raya	Pedesaan
	22. Tanjung Kepayang	Pedesaan		4. Banyu Urip	Perkotaan
	23. Kedondong Raye	Perkotaan		5. Suka Damai	Pedesaan
	24. Suka Raja Baru	Pedesaan		6. Muara Sugih	Perkotaan
	25. Terlangu	Pedesaan		7. Suka Tani	Pedesaan
	26. Rimba Balai	Pedesaan		8. Sri Menanti	Pedesaan
				9. Bangun Sari	Pedesaan
8	Sembawa			10. Sumber Mekar Mukti	Pedesaan
	1. Pulau Harapan	Pedesaan		11. Kuala Puntian	Pedesaan
	2. Lalang Sembawa	Perkotaan		12. Telang Sari	Pedesaan
	3. Rejodadi	Perkotaan		13. Mulya Sari	Perkotaan
	4. Mainan	Perkotaan		14. Purwosari	Pedesaan
	5. Limau	Pedesaan		15. Bunga Karang	Pedesaan

**PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN (FS)  
TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST) SEMUNTUL**  
KABUPATEN BANYUASIN

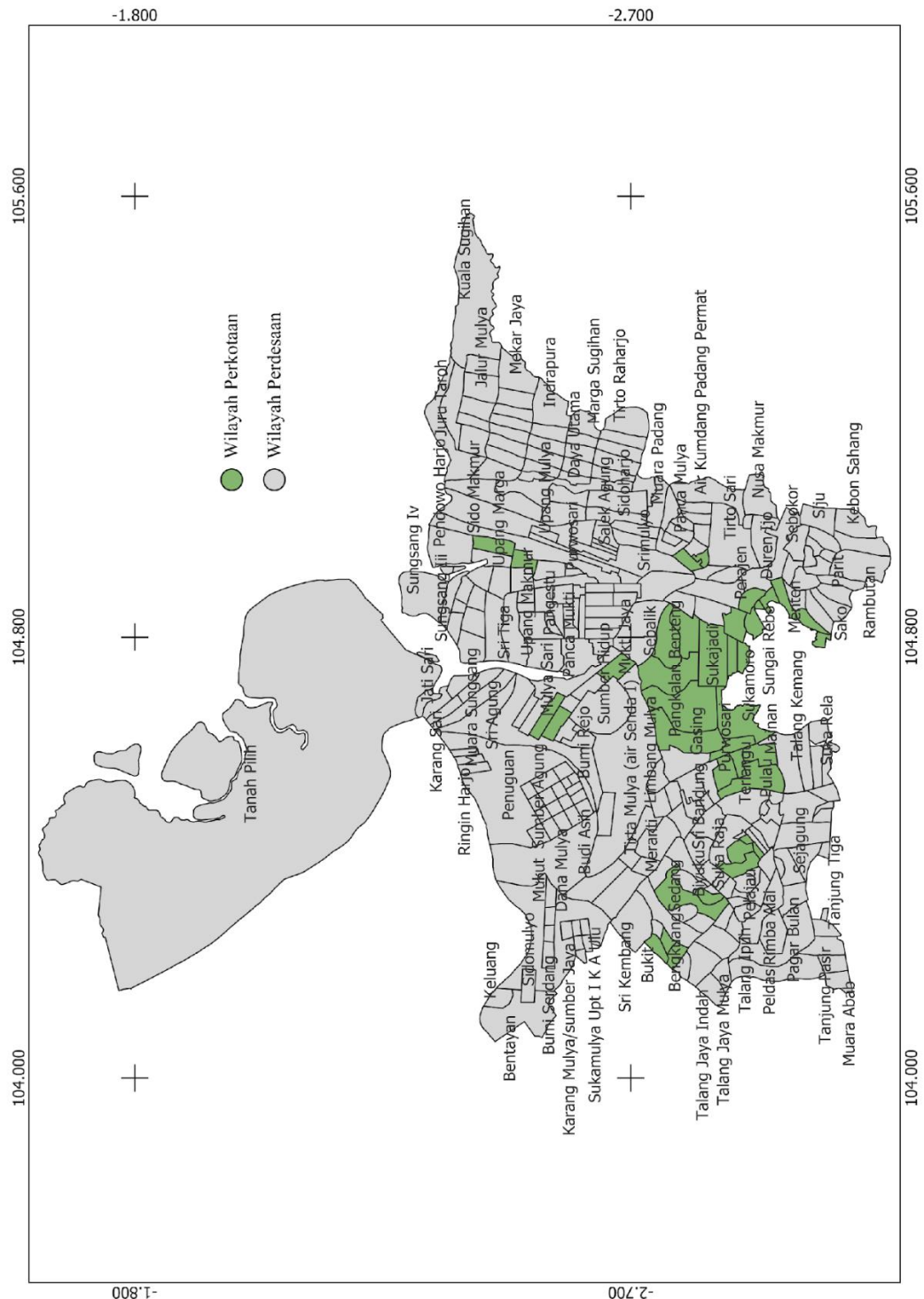
No	Kecamatan/Kelurahan/Desa	klasifikasi	No	Kecamatan/Kelurahan/Desa	klasifikasi
<b>11</b>	<b>Banyuasin I</b>			12. Gelebak Dalam	Pedesaan
	1. Sungai Rebo	Perkotaan		13. Sako	Pedesaan
	2. Sungai Gerong	Perkotaan		14. Pangkalan Gelebak	Pedesaan
	3. Mariana	Perkotaan		15. Sungai Pinang	Perkotaan
	4. Tirta Sari	Pedesaan		16. Sungai Kedukan	Perkotaan
	5. Pematang Palas	Pedesaan		17. Sungai Dua	Pedesaan
	6. Perajen	Perkotaan		18. Menten	Pedesaan
	7. Pulau Borang	Pedesaan		19. Baru	Pedesaan
	8. Merah Mata	Pedesaan		20. Jakabaring Selatan	Perkotaan
	9. Cinta Manis Lama	Pedesaan			
	10. Perambahan	Pedesaan	<b>14</b>	<b>Muara Padang</b>	
	11. Mariana Ilir	Perkotaan		1. Muara Padang	Pedesaan
	12. Duren Ijo	Pedesaan		2. Karang Anyar	Pedesaan
	13. Perambahan Baru	Pedesaan		3. Tanjung Baru	Pedesaan
				4. Margo Mulyo 20	Pedesaan
<b>12</b>	<b>Air Kumbang</b>			5. Purwodadi	Pedesaan
	1. Sido Mulyo	Pedesaan		6. Sumber Makmur	Perkotaan
	2. Cinta Manis Baru	Pedesaan		7. Sido Mulyo 18	Pedesaan
	3. Nusa Makmur	Pedesaan		8. Air Gading	Pedesaan
	4. Sebokor	Pedesaan		9. Tirta Raharjo	Pedesaan
	5. Rimba Jaya	Pedesaan		10. Marga Sugihan	Pedesaan
	6. Panca Desa	Perkotaan		11. Sidorejo	Pedesaan
	7. Teluk Tenggirik	Perkotaan		12. Sidomulyo 20	Pedesaan
	8. Padang Rejo	Pedesaan		13. Daya Makmur	Pedesaan
	9. Budi Mulya	Pedesaan		14. Daya Utama	Pedesaan
	10. Sido Makmur	Pedesaan		15. Tirta Jaya	Pedesaan
	11. Kumbang Padang Permata	Pedesaan			
	12. Tirta Makmur	Pedesaan	<b>15</b>	<b>Muara Sugihan</b>	
	13. Panca Mulya	Pedesaan		1. Daya Murni	Pedesaan
	14. Muara Baru	Pedesaan		2. Daya Bangun Harjo	Pedesaan
	15. Air Kumbang Bakti	Perkotaan		3. Sumber Mulyo	Pedesaan
	16. Sebusus	Pedesaan		4. Margo Mulyo 16	Pedesaan
				5. Sugih Waras	Pedesaan
<b>13</b>	<b>Rambutan</b>			6. Indrapura	Pedesaan
	1. Rambutan	Pedesaan		7. Cendana	Pedesaan
	2. Kebon Sahang	Pedesaan		8. Argo Mulyo	Pedesaan
	3. Pulau Parang	Pedesaan		9. Rejo Sari	Pedesaan
	4. Siju	Pedesaan		10. Tirta Harjo	Perkotaan
	5. Tanah Lembak	Pedesaan		11. Daya Kesuma	Pedesaan
	6. Parit	Pedesaan		12. Margo Rukun	Pedesaan
	7. Pelajau	Pedesaan		13. Ganesha Mukti	Pedesaan
	8. Suka Pindah	Pedesaan		14. Gilirang	Pedesaan
	9. Durian Gadis	Pedesaan		15. Tirta Mulyo	Pedesaan
	10. Tanjung Kerang	Pedesaan		16. Beringin Agung	Pedesaan
	11. Tanjung Merbu	Pedesaan		17. Jalur Mulya	Pedesaan



**PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN (FS)  
TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST) SEMUNTUL**  
KABUPATEN BANYUASIN

No	Kecamatan/Kelurahan/Desa	Klasifikasi	No	Kecamatan/Kelurahan/Desa	klasifikasi
	18. Timbul Jaya	Pedesaan		8. Rimau Sungsang	Pedesaan
	19. Juru Taro	Pedesaan		9. Muara Sungsang	Pedesaan
	20. Kuala Sugihan	Pedesaan		10. Marga Sungsang	Pedesaan
	21. Sido Makmur	Pedesaan			
	22. Mekar Jaya	Pedesaan	19	<b>Karang Agung Ilir</b>	Pedesaan
16	<b>Makarti Jaya</b>			1. Sumber Rejeki	Pedesaan
	1. Upang Makmur	Pedesaan		2. Sri Agung	Pedesaan
	2. Pangestu	Pedesaan		3. Mekar Sari	Pedesaan
	3. Makarti Jaya	<b>Perkotaan</b>		4. Karang Sari	Pedesaan
	4. Tirta Kencana	Pedesaan		5. Majuria	Pedesaan
	5. Delta Upang	<b>Perkotaan</b>		6. Jati Sari	<b>perkotaan</b>
	6. Pendowo Harjo	Pedesaan		7. Tabala Jaya	Pedesaan
	7. Upang Mulya	Pedesaan	20	<b>Muara Telang</b>	
	8. Purwosari	Pedesaan		1. Mukti Jaya	Pedesaan
	9. Muara Baru	Pedesaan		2. Mekar Sari	Pedesaan
	10. Sungai Semut	Pedesaan		3. Talang Jaya	<b>Perkotaan</b>
	11. Tanjung Baru	Pedesaan		4. Telang Makmur	Pedesaan
	12. Tanjung Mas	Pedesaan		5. Sumber Hidup	Pedesaan
17	<b>Air Salek</b>			6. Telang Rejo	Pedesaan
	1. Sri Mulyo	Pedesaan		7. Telang Karya	Pedesaan
	2. Sri Katon	Pedesaan		8. Sumber Mulya	Pedesaan
	3. Sido Harjo	Pedesaan		9. Marga Rahayu	Pedesaan
	4. Bintaran	Pedesaan		10. Panca Mukti	Pedesaan
	5. Damar Wulan	Pedesaan		11. Mekar Mukti	Pedesaan
	6. Engggal Rejo	Pedesaan		12. Talang Indah	Pedesaan
	7. Air Solok Batu	Pedesaan		13. Upang Jaya	Pedesaan
	8. Saleh Agung	Pedesaan		14. Upang Ceria	Pedesaan
	9. Saleh Mukti	<b>Perkotaan</b>		15. Upang Cemara	Pedesaan
	10. Saleh Jaya	Pedesaan		16. Upang Karya	Pedesaan
	11. Saleh Mulya	Pedesaan	21	<b>Sumber Marga Telang</b>	
	12. Saleh Makmur	Pedesaan		1. Karang Baru	Pedesaan
	13. Upang	Pedesaan		2. Karang Anyar	Pedesaan
	14. Upang Marga	Pedesaan		3. Muara Telang Marga	Pedesaan
18	<b>Banyuasin II</b>			4. Sri Tiga	Pedesaan
	1. Teluk Payo	Pedesaan		5. Muara Telang	<b>Perkotaan</b>
	2. Sungsang III	<b>Perkotaan</b>		6. Sumber Jaya	Pedesaan
	3. Sungsang I	<b>Perkotaan</b>		7. Terusan Muara	Pedesaan
	4. Sungsang II	<b>Perkotaan</b>		8. Terusan Tengah	Pedesaan
	5. Sungsang IV	<b>Perkotaan</b>		9. Terusan Dalam	Pedesaan
	6. Tanah Pilih	Pedesaan		10. Talang Lubuk	Pedesaan
	7. Perajen Jaya	Pedesaan			

Sumber : Peraturan Kepala Bps 2020 & Perda No. 6 Tahun 202



**Gambar 3.4 Klasifikasi Wilayah Perkotaan dan Perdesaan**

## Sistem Pengelolaan Sampah

Kebijakan sistem pengelolaan sampah dalam skala nasional dijelaskan dalam PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dan Peraturan Menteri PU No. 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana

dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

**a. Pemilahan/Pewadahan**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin sudah mulai menyamakan pewadahan sampah di beberapa tempat fasilitas umum, seperti di perkantoran yang memiliki TPS sendiri maupun pasar. Hal ini harus dioptimalkan kembali di beberapa wilayah yang memiliki fasilitas umum agar memudahkan dalam pengumpulan juga walau pewadahan ini belum masuk ke tahap pemilahan. Pemilahan sampah juga dapat membantu dalam pengolahan sampah yang lebih mudah dan tepat sasaran, sehingga dalam perencanaan akan ditemukan pengolahan seperti apa yang akan cocok.

**b. Pengumpulan**

Pengelolaan sampah dalam aspek pengumpulan di Kabupaten Banyuasin saat ini yang masih menggunakan pola kumpul-angkut-buang menjadi pola pengurangan di sumber. Semua sampah yang dihsilkan di pusat-pusat wilayah kota harus dikumpulkan dengan cara yang benar dan di tempat yang disediakan dengan benar sehingga tidak menimbulkan masalah bagi lingkungan dan manusia, serta efektif dan efisien dengan memperhatikan kelayakan secara teknis dan finansial khususnya pada kegiatan pengumpulan yang bersifat padat modal.

**c. Pengangkutan**

Prioritas pelayanan kebersihan perlu diberikan lebih kepada daerah permukiman padat, daerah komersial dan high income, tempat-tempat umum dan unsur wajah kota dengan pertimbangan kesehatan lingkungan, potensi dukungan pembiayaan, dan pandangan kota yang positif. Prioritas pelayanan juga perlu diberikan pada kawasan strategis seperti wisata, industri, dan lain-lain untuk memacu perkembangan kawasan/sektor tersebut. Sampah di daerah perdesaan dan wilayah yang tidak terjangkau oleh pelayanan kebersihan harus diolah setempat dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak mengganggu kesehatan lingkungan.

**d. Pengolahan**

Kebijakan pengolahan sampah dengan menggeser pola sentralisasi ke desentralisasi dengan membuat pengelolaan sampah sedekat mungkin dengan sumber. Sampah di daerah perdesaan dan wilayah yang tidak terjangkau oleh pelayanan kebersihan harus diolah setempat dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak mengganggu kesehatan lingkungan. Penerapan teknologi pengolahan perlu diupayakan untuk mengurangi ketergantungan pada TPA Sampah dengan memperhatikan kelayakan secara teknis, ekonomis, maupun lingkungan.

**e. Pemrosesan Akhir**

Tempat pemrosesan akhir merupakan tempat dimana seluruh sampah terkonsentrasi dan berpotensi tinggi mengganggu lingkungan, sehingga harus direncanakan dan disiapkan dengan baik, dioperasikan dan dikelola secara aman dan sehat. Wilayah TPA ini juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan. Wilayah yang dilayani oleh TPA ini juga sebaiknya tidak terlalu jauh dari tempat pengumpul.

# **BAB IV**

## **METODOLOGI**

### **4.1. Kerangka Pelaksanaan Pekerjaan**

#### **4.1.1 Pendekatan Penanganan Pekerjaan**

Metode pendekatan dalam penanganan pekerjaan yang digunakan dalam pekerjaan ini, terdiri dari 3 jenis yaitu pendekatan teknis, koordinatif, dan normatif.

a. Pendekatan Teknis

Pendekatan teknis merupakan pendekatan dalam pemecahan permasalahan yang bersifat teknis, yaitu dengan menggunakan standar, metode, kriteria, dan asumsi teknis yang berlaku dan relevan, sehingga output yang dihasilkan sesuai dengan kaidah-kaidah teknis. Standar, metode, dan peraturan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah yang berlaku dan relevan dengan kriteria teknis yang ada

b. Pendekatan Koordinatif

Pendekatan koordinatif dalam pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Feasibility Study TPA Dadapan Kabupaten Lamongan, merupakan koordinasi yang dilakukan dengan berbagai instansi terkait dan semua pihak untuk pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berupa informasi dan studi-studi terdahulu yang menunjang pelaksanaan pekerjaan, sehingga diperoleh data yang komprehensif dan akurat sesuai kondisi di lapangan.

c. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif merupakan pendekatan dalam penyusunan dokumen perencanaan dengan tetap mengacu pada pedoman teknis mengenai Tempat Pemrosesan Akhir Metode dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain

#### **4.1.2 Metodologi Pekerjaan**

Kerangka pekerjaan disusun saat akan melaksanakan pekerjaan yang akan digunakan untuk menjelaskan pertautan antara komponen pekerjaan. Alur-alur pemikiran yang logis disusun sehingga dapat membuahkan kesimpulan jadi kerangka pekerjaan menjelaskan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai data dan selanjutnya akan dianalisis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel penelitian dan dapat suatu kesimpulan. Konsultan harus mengembangkan metodologi pendekatan ini dalam usulan teknis mulai dari metode pengumpulan data yang relevan, konsepsi perencanaan, dan penyusunan kebijakan pengendalian lingkungan hidup.

a. Metode Identifikasi Kondisi Eksisting

b. Metode Pengumpulan Data

- c. Analisis Kajian Kelayakan
- d. Metode Pengembangan Program dan Kegiatan serta Perkiraan Kebutuhan Investasi

#### **4.1.3 Penyusunan Laporan**

Konsultan dalam menjalankan tugasnya diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan yang terdiri dari:

- a. Laporan Pendahuluan  
Metoda atau cara pelaksanaan kegiatan serta jadwal rinci untuk melaksanakan setiap kegiatan, serta personil yang akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini, diserahkan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah ditanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), sebanyak 5 (lima) buku laporan.
- b. Laporan Akhir  
Perumusan dan penyempurnaan dari hasil pembahasan Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir harus diserahkan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah ditanda tangannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), sebanyak 5 (lima) buku laporan

### **4.2. Rencana Kerja**

#### **4.2.1 Tahap Persiapan**

Langkah awal dalam pekerjaan penyusunan adalah penyamaan konsep dan paradigma. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepahaman dan kesamaan konsep dan paradigma dalam pengelolaan dan pengembangan program sampah yang berkualitas diantara para pihak terkait. Tujuan lainnya adalah tercapainya kesepakatan mengenai langkah penyusunan, jadwal kerja, tugas, dan tanggung jawab semua instansi terkait. Beberapa rencana kegiatan dari tahapan penyamaan persepsi dan paradigma ini, diantaranya adalah:

- a. Menyiapkan administrasi, seperti surat jalan, perijinan, dan sebagainya
- b. Melakukan studi literatur yang berkaitan dengan penyelenggaraan persampahan yang berkualitas
- c. Melakukan studi literatur terkait studi terdahulu dan standar teknis persampahan
- d. Melakukan observasi pendahuluan di daerah perencanaan
- e. Membuat program kerja dan jadwal kegiatan
- f. Menyiapkan instrument yang diperlukan
- g. Menyamakan persepsi dengan seluruh stakeholder mengenai konsep dan paradigma penyelenggaraan persampahan yang berkualitas.

#### **4.2.2 Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam kegiatan Jasa Konsultansi Penyusunan FS TPA Dadapan Kabupaten Lamongan Tahun 2023 meliputi data primer yang diperoleh dari survei lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi dan pihak terkait. Data primer dalam



pekerjaan ini diperoleh berdasarkan kegiatan survei lapangan yang berupa survey kondisi eksisting. Data sekunder dapat diperoleh melalui kegiatan survei instansional yang dilakukan pada dinas terkait. Kebutuhan data sekunder yang digunakan dalam pekerjaan ini yaitu:

- a. Peta-peta meliputi :
  1. peta topografi
  2. peta geologi lingkungan
  3. peta hidrogeologi
  4. peta bencana alam
  5. peta administrasi
  6. peta kepemilikan lahan
  7. peta tata guna lahan
  8. peta iklim
- b. Kondisi fisik rencana lokasi TPA yang akan dinilai meliputi :
  1. kondisi geologi (sebaran tanah dan batuan, struktur geologi, ketebalan tanah penutup, sifat fisik kimiawi dan keteknikan tanah)
  2. kondisi hidrogeologi (kedalaman muka air tanah, kelandaian aliran air tanah bebas, pola pengeringan air permukaan, lokasi mata air, kelulusan);
  3. kondisi bencana alam (gerakan tanah, banjir, gempa, bahaya gunung api)
- c. Data iklim dan curah hujan
- d. Data penduduk.
- e. Data status lahan, batas administrasi, dan kapasitas lahan
- f. Data infrastruktur (misal : data infrastruktur jalan, drainase, air bersih, listrik, telepon, dan persampahan).

#### **4.2.3 Analisis Kelayakan**

##### **Analisis Teknis**

Pengkajian kelayakan aspek teknis mencakup analisis teknis pada saat penyelenggaraan TPST/TPA yang akan dibangun. Analisis mencakup :

- a. Lokasi TPST
- b. Rencana Wilayah Pelayanan
- c. Kapasitas TPST dan Desain Teknologi

##### **Analisis Lingkungan**

Pengkajian kelayakan aspek lingkungan mempertimbangkan kegiatan masyarakat dan kondisi daerah setempat secara holistik untuk menentukan kelayakan faktor-faktor lingkungan dalam penyelenggaraan TPA. Pengkajian kelayakan aspek lingkungan dilaksanakan melalui penyusunan dokumen AMDAL, formulir UKL-UPL, SPPL, dan izin lingkungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

##### **Analisis Ekonomi/Keuangan**

Pengkajian kelayakan aspek ekonomi ditentukan untuk memperkirakan biaya investasi dan biaya operasional TPST bagi penyelenggara dalam jangka waktu tertentu. Sasaran dari analisa keuangan ini untuk mengetahui apakah kegiatan yang akan dilaksanakan ini dari segi keuangan dinilai layak, dalam arti mempunyai dana yang cukup untuk membiayai pengoperasian seluruh fasilitas yang ada

# **BAB V**

## **ORGANISASI**

### **PELAKSANA KEGIATAN**

#### **5.1 Jadwal Penugasan Personil**

Pelaksanaan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini terdiri dari 2 (dua) orang tenaga ahli yang berpengalaman, dengan komposisi sebagai berikut:

1. Team Leader / Ahli Lingkungan (1 orang)

Minimal S1 Teknik Lingkungan dengan pengalaman 7 (tujuh) tahun dalam bidang persampahan dilengkapi dengan Sertifikat Keahlian (SKA/SKK) Ahli Teknik Lingkungan - Muda.

2. Tenaga Ahli Sipil (1 orang)

Minimal S1 Teknik Sipil dengan pengalaman 5 (lima) tahun dalam bidang persampahan dilengkapi dengan Sertifikat Keahlian (SKA/SKK) Ahli Teknik Bangunan Gedung - Muda..

Beberapa tenaga pendukung yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan ini, antara lain :

1. Asisten Ahli Lingkungan (1 orang)

2. Surveyor 3 orang)

3. Administrasi (1 orang)

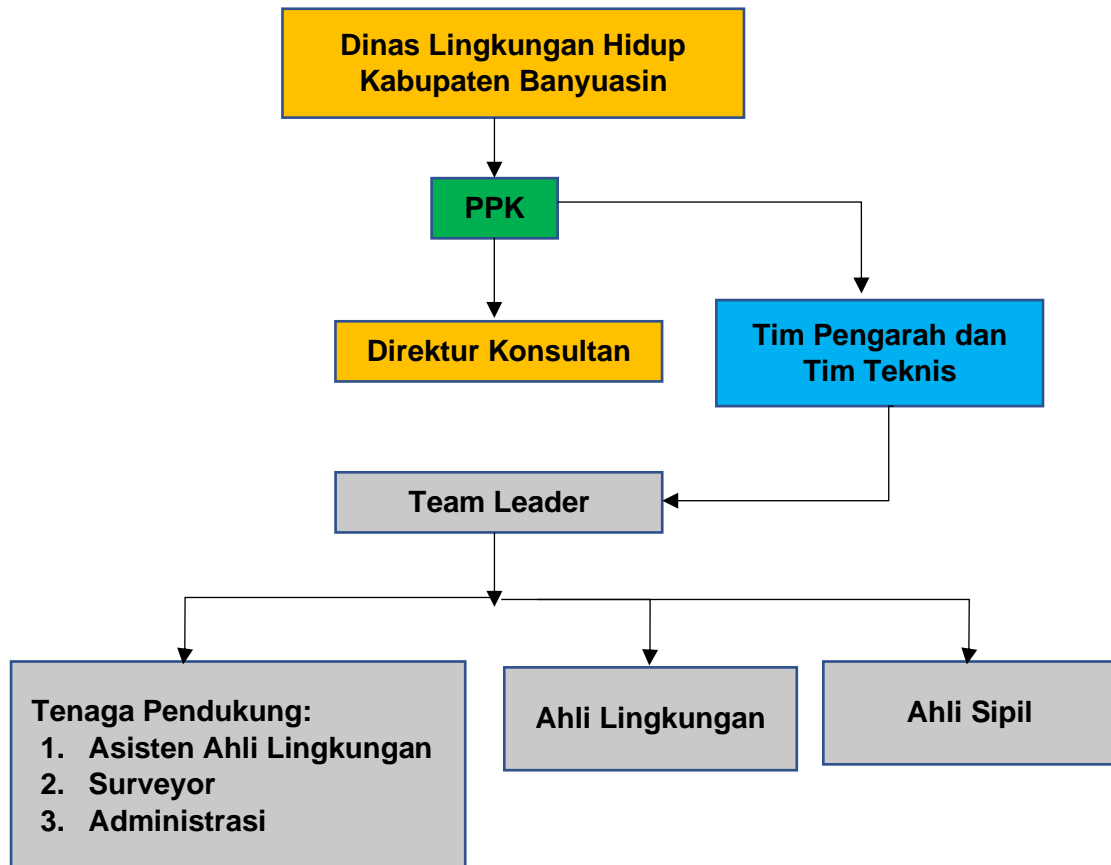
Adapun keterlibatan tenaga ahli dan tenaga pendukung tersebut selama pekerjaan disajikan pada **Tabel 5.1**

**Tabel 5.1 Penugasan Personil**

Posisi	Kualifikasi			Jumlah Orang Bulan
	Pendidikan	Keahlian & Status Tenaga Ahli	Pengalaman	
Tenaga Ahli				
Team Leader / Ahli Lingkungan	Min. S1 Teknik Lingkungan	SKA/SKK Ahli Teknik Lingkungan - Muda	7 (tujuh) tahun	2
Tenaga Ahli Sipil	Min. S1 Teknik Sipil	-	5 (lima) tahun	2

## 5.2 Struktur Organisasi Personil

Sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam pekerjaan Penyusunan *Feasibility Study* (FS) TPST Semuntul Kabupaten Banyuasin, maka Konsultan membuat struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan guna memudahkan dalam mengkoordinasi seluruh tim. Struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan secara lengkap dalam **Gambar 5.1**



Gambar 5.1 Struktur Organisasi Pelaksanaan FS TPST Semuntul Kabuapten Banyuasin